

SKRIPSI

**“PENGELOLAAN HUTAN NAGARI PADA PERHUTANAN
SOSIAL NAGARI TARAM, KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA”**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

MUHAMMAD DIDA DHARMAWAN
1910112180

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM HUKUM AGRARIA
DAN SUMBER DAYA ALAM (PK- VIII)**



Pembimbing :

Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 01/PK-VIII/V/2024

ABSTRAK

Sejak tahun 2016 Nagari Taram merupakan daerah yang turut menerima manfaat atas sumber daya alam lewat skema perhutanan sosial. Banyak sekali kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh LPHN Nagari Taram untuk memajukan perekonomian lewat pengelolaan hutan. Meskipun demikian, pengelolaan hutan menghadapi tantangan signifikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah Pengelolaan Hutan Nagari oleh Masyarakat Nagari Taram, Kabupaten lima puluh kota? Bagaimanakah Tantangan dalam Pengelolaan Hutan Nagari Oleh Masyarakat Nagari Taram, Kabupaten lima puluh kota? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Serta sifat dari penelitian ialah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukis sesuatu hal secara tepat, faktual dan akurat mengenai Pengelolaan Hutan Pada Hutan Sosial Nagari Taram Kabupaten 50 Kota serta Dampak Tindakan Perusakan Hutan Pada Hutan Sosial Nagari Taram Kabupaten 50 Kota. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan Program perhutanan sosial di Hutan Nagari Taram berhasil mengelola hutan secara berkelanjutan di bawah pengawasan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN), dengan dukungan dari Pokja yang mempercepat pengelolaan hutan ini. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh LPHN Nagari Taram ialah aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan penambangan merusak ekosistem hutan dan mengancam sumber daya alam, masih menjadi sebuah kondisi yang dihadapi. Saat ini, terdapat LPHN yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan hutan dan seharusnya menjadi garda terdepan dalam penindakan kegiatan perusakan hutan. Selain itu, Pokja juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih dalam menjaga kelestarian hutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait diharapkan dapat mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan lingkungan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Hutan Nagari, Nagari Taram.